

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017

Diah Tri Hermawati

diah_triuwks@yahoo.co.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul kajian Analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan. Tujuan kajian (1) Menyusun Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; (2) Mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.

Lokasi Analisis Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki pemerintah kabupaten pasuruan. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah berpedoman pada Panduan Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K, tahun 2011.

Hasil (1) persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir menurun rata-rata sebesar 0,24 %/tahun; (2) tahun 2016, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 10,72% menjadi 10,57% di tahun 2016; (3) tahun 2016, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional; (4) perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, tetapi masih di atas target RPJMD; (5) indikator-indikator yang perlu perhatian (menjadi focus) untuk menda-patkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah sebagaimana tabel berikut: (6) telah memiliki regulasi yang secara spesifik mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut; (7) program/kegiatan yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi: (8) ruang fiskal pendapatan daerah masih di bawah 50 persen, dengan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kabupaten Pasuruan sangat tergantung dengan pihak eksternal dalam membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.

Kata Kunci: Strategi, Efektivitas, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui imple-mentasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan Indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Tujuan Kegiatan.

1. Menyusun Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016;
2. Mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan.

Pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran. Sebelumnya, kemiskinan dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, seperti aspek pendapatan, pengeluaran atau aset/faktor produksi. Pemahaman tersebut diantaranya seperti direpresentasikan oleh dua lembaga keuangan internasional, World Bank dan Asian Development Bank (ADB). World Bank menetapkan kategori miskin bila tingkat pengeluaran kurang dari US\$ 2 PPP per orang per hari. Pandangan tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mc.Quibria, seorang Ekonom Senior pada Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, seseorang maupun sekelompok orang baik laki maupun perempuan dikatakan miskin bila tidak mampu menggunakan aset/modal yang dimilikinya. Seseorang miskin, bila hanya punya aset tenaga namun tidak bekerja atau tinggal di desa, namun tidak punya tanah (sawah atau kebun).

Saat ini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang mencakup dimensi kehidupan yang jauh lebih luas. Wacana tentang kemiskinan telah bersifat multi dimensi, baik budaya, sosial, ekonomi maupun politik. Dampak kemiskinan juga disadari bersifat multi dimensi. Karenanya, strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinanpun cenderung menjadi komprehensif dan lintas sektor. Kemiskinan juga dapat di pandang dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dengan pendekatan berdasar identifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

golongan atau dengan kata lain kemiskinan relatif berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.

Sedangkan cara pandang kemiskinan yang dikemukakan dalam dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupannya yang layak. Cara pandang terhadap kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengacu bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara baik.

Dengan digunakannya konsep kemiskinan berbasis hak, maka dalam SNPK juga dinyatakan, kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Di samping permasalahan pemenuhan hak-hak dasar, dokumen SNPK juga memandang persoalan kemiskinan dari sudut pandang persoalan beban kependudukan dan permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan gender serta permasalahan kesenjangan antar wilayah. Dokumen SNPK juga memandang bahwa Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survey.

METODOLOGI

Lokasi Analisis Pelaksanaan penang-gulangan Kemiskinan Daerah dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat di percaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan. Metode analisis :

- Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi Tim Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Daerah (TKPD), yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2011;
- Pedoman Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang diterbitkan Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2011;

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

- Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014; dan
- Modul-modul lembar kerja penyusunan SPKD.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Kebijakan

Kebijakan berupa peraturan, program dan kegiatan telah diupayakan dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Beberapa program dan kegiatan ada yang merupakan program Pemerintah Pusat baik yang sumber pendanaannya oleh Pemerintah Pusat maupun sharing dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam menanggulangi kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau kluster, yaitu:

- Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- Program-program lainnya baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan dimaksud dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan program Nasional baik yang pernah dan tengah berlangsung di Kabupaten Pasuruan menurut kluster program adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang termasuk kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (klaster 1) adalah:
 - Program Keluarga Harapan (PKH);
 - Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN);
 - Program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - Jamkesmas-Jamkesda.
2. Program/kegiatan yang termasuk kelompok program pemberdayaan masyarakat (klaster 2) adalah: PNPM Mandiri Perkotaan; dan □ PNPM Mandiri Pedesaan.
3. Program/kegiatan yang termasuk kelompok program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3) adalah: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Program Kredit Usaha Bersama.

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

Tinjauan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan dan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang telah dilakukan ternyata masih memiliki berbagai kendala. Beberapa program sudah tepat sasaran dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan warga miskin. Namun di lain pihak, masih ada program yang dinilai belum mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga miskin, atau bahkan bisa dikatakan kontra produktif dan perlu dikaji ulang kembali nilai kemanfaatannya.

Pada bidang pendidikan, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi program yang paling sering muncul di bahan perbincangan masyarakat. Hadirnya program BOS yang bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi keluarga miskin pada kenyataannya malah menjadikan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat miskin semakin besar, atau istilah warga miskin "ada BOS, sekolah gratis, tapi biaya sekolah tambah besar". Hal ini dikarenakan karena biaya pendidikan tidak diringankan melainkan dipindahkan, dimana biaya sekolah digratiskan, namun ada biaya tambahan yang semakin besar untuk buku-buku pelajaran, iuran sekolah, seragam, dll. Selain itu, masih dibutuhkan sosialisasi mengenai program BOS kepada masyarakat terutama warga miskin yang masih belum paham mengenai keberadaan dan fungsi program BOS kepada mereka. Keberadaan komite sekolah di beberapa sekolah malah dijadikan sebagai legitimasi dari pihak sekolah terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Kurangnya transparansi dari pihak sekolah mengenai pengelolaan bantuan biaya BOS di tambah dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan warga miskin mengenai program BOS menambah daftar permasalahan yang terjadi pada program BOS tersebut.

Dalam hal pangan, program bantuan beras bersubsidi (raskin) juga menemui berbagai permasalahan. Permasalahan utama dari program raskin ini adalah mekanisme pembagian raskin yang belum merata kepada seluruh warga miskin, bahkan warga yang tidak termasuk miskin pun ikut mendapatkan jatah raskin tersebut. Keterbatasan dalam proses pendataan sasaran penerima manfaat mengakibatkan terjadinya pembengkakan subsidi negara untuk program ini karena subsidi raskin juga dinikmati oleh warga yang tidak masuk dalam kategori miskin.

Di lain pihak, warga miskin bersikap pasrah pada saat jatah raskin yang diberikan kepada mereka lebih sedikit daripada jatah seharusnya (karena porsi raskinnya dikurangi dan dibagi kepada warga yang tidak miskin). Program ini sangat dibutuhkan pendataan terbaru setiap tahun dari tingkat desa, supaya pembagian raskin tepat sesuai sasaran. Pelaksanaan program Jamkesmas sebagai upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin sudah berjalan lebih baik, dengan semakin meratanya warga miskin yang mendapatkan program ini (walaupun tetap masih ada warga miskin yang belum tersentuh program jamkesmas). Keterbatasan lain dari program jamkesmas adalah program jamkesmas hanya terbatas menjangkau penyembuhan penyakit yang ringan saja, sedangkan untuk penyakit berat, pasien harus membayar biaya sendiri. Selain itu, keterbatasan pengetahuan warga miskin terhadap program jamkesmas juga berdampak pada saat proses administrasi di Rumah Sakit, dimana warga miskin tidak begitu mengetahui mekanisme jamkesmas (menjadi pasien reguler), kemudian dengan tiba-tiba minta dipindah menggunakan jamkesmas, sementara data yang sudah masuk ke Rumah Sakit adalah data pasien reguler.

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

Bantuan stimulan perumahan swadaya (Rehabilitasi RTLH) pada dasarnya sangat diharapkan oleh masyarakat sangat miskin dengan kondisi rumahnya yang tidak layak huni. Program ini dipandang sangat tepat untuk mengentaskan kemiskinan karena langsung mengenai 4 (empat) dari 14 (empat belas) indikator kemiskinan yang diterbitkan BPS. Kendala dari program ini adalah ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, sehingga pemberian bantuannya pun terbatas.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 4 (empat) kelompok program atau klaster, yaitu:

- Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, ber-tujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2014 mengeluarkan program baru yang disebut dengan program “Pasuruan Maslahat”. Program ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa tertinggal, yang difokuskan pada program Desa Maslahat untuk 24 desa di 24 kecamatan. Desa-desanya yang mendapat program ini akan didorong supaya mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tidak semua desa di wilayah Kabupaten Pasuruan mendapatkan kriteria ini. Sebab, kriteria desa-desanya yang mendapat program tersebut antara lain yaitu memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang tergolong rendah, serta memiliki potensi yang bisa untuk dioptimalkan. Salah satu kriteria desa yang mendapatkan program ini antara lain, yaitu apabila terdapat sebuah desa yang memiliki banyak lahan kosong. Maka yang akan difokuskan di desa itu adalah ke arah peternakan. Dan apabila di desa itu memiliki potensi industri kreatif. Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dana lintas SKPD. Misalnya seperti, dari Dinas Perikanan, yang akan mendorong desa-desanya yang memiliki potensi perikanan. Untuk menjalankan program ini, maka akan dilibatkan perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, dan juga kepemudaan.

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

Tabel 1
Lokasi Desa Maslahat

| No | Kecamatan | Desa |
|----|------------|-------------|
| 1 | Purwodadi | Jatisari |
| 2 | Tutur | Kalipucung |
| 3 | Puspo | Jimbaran |
| 4 | Tosari | Podokoyo |
| 5 | Lumbang | Wonorejo |
| 6 | Pasrepan | Siban |
| 7 | Kejayan | Lorokan |
| 8 | Wonorejo | Karangsono |
| 9 | Purwosari | Sukodermo |
| 10 | Prigen | Jatiarjo |
| 11 | Sukorejo | Sukorame |
| 12 | Pandaan | Banjarkejen |
| 13 | Gempol | Jeruk Purut |
| 14 | Beji | Kenep |
| 15 | Bangil | Tambakan |
| 16 | Rembang | Kalisat |
| 17 | Kraton | Curahdukuh |
| 18 | Pohjentrek | Legowok |
| 19 | Gd. Wetan | Wonosari |
| 20 | Rejoso | Jarangan |
| 21 | Winongan | Jeladri |
| 22 | Grati | Plososari |
| 23 | Lekok | Jatirejo |
| 24 | Nguling | Sudimulyo |

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakuklan di Kabupaten Pasuruan adalah melaksanakan program Desa Maslahat dengan alokasi dana APBD selalu meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun ada penurunan pada tahun 2017. Adapun perincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2
Perincian Anggaran Tiap SKPD untuk Pelaksanaan Desa Maslahat

| No | SKPD | Anggaran | | | | TOTAL |
|-----|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Dinas KB dan PP | 208.374.000 | 269.880.000 | 269.880.000 | 389.802.000 | 1.137.936.000 |
| 2 | DISPENDUKCAPIL | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.400.000 | 81.600.000 |
| 3 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | - | - | 450.000.000 | - | 450.000.000 |
| 4 | Dinas Koperasi dan Unit Usaha Mikro | 38.626.000 | - | 249.387.000 | 221.051.000 | 509.064.000 |
| 5 | Dinas Pendidikan | - | 1.821.770.000 | 2.615.970.000 | 2.125.970.000 | 6.563.710.000 |
| 6 | Dinas PMD | - | 1.244.850.000 | 609.605.000 | 357.035.000 | 2.211.490.000 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja | - | 45.725.000 | 122.625.000 | 206.475.000 | 374.825.000 |
| 8 | Dinas Pertanian | - | 6.771.221.000 | 462.535.000 | 682.034.000 | 7.915.790.000 |
| 9 | Dinas PU, SDA dan Tata Ruang | - | - | 4.417.123.000 | 1.482.873.000 | 5.899.996.000 |
| 10 | BAKESBANGPOL | - | 51.220.000 | 383.100.000 | 115.854.000 | 550.174.000 |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 222.866.000 | 202.717.000 | 217.340.000 | 642.923.000 |
| 12 | Bagian Kesejahteraan Sosial | - | - | - | 425.000.000 | 425.000.000 |
| | JUMLAH DIPINDAHKAN | 267.400.000 | 10.447.932.000 | 9.803.342.000 | 6.243.834.000 | 26.762.508.000 |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | - | 18.000.000 | - | 15.400.000 | 33.400.000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | - | 244.365.000 | 10.380.000 | 31.950.000 | 286.695.000 |
| 15 | Dinas Perikanan | 1.687.691.000 | 1.885.880.000 | 877.852.000 | 905.205.000 | 5.356.628.000 |
| 16 | Dinas PERKIM | 925.877.000 | 3.025.877.000 | 5.135.880.000 | 5.135.880.000 | 14.223.514.000 |
| 17 | Dinas Komunikasi dan | - | 360.275.000 | 469.525.000 | 224.000.000 | 1.053.800.000 |

*Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)*

| No | SKPD | Anggaran | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Informatika | | | | | |
| 18 | Dinas Peternakan dan Ket. Pangan | - | - | - | 354.242.000 | 354.242.000 |
| 19 | DISPERINDAG | 174.770.000 | 19.483.000 | 164.517.000 | 192.903.000 | 551.673.000 |
| 20 | Dinas Sosial | - | - | - | 364.085.000 | 364.085.000 |
| 21 | Dinas PU. Bina Marga | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 3.055.958.000 | 16.001.812.000 | 16.461.507.000 | 13.467.499.000 | 48.986.545.000 |

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan

Program dan Kegiatan Desa Masalah

Program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap dinas dan badan serta bagian-bagian pada pemerintahan kabupaten Pasuruan di setiap desa masalah cukup bervariasi. Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat miskin sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik dan sejahtera.

Adapun rincian program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Bagian dapat dilihat secara rinci seperti tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Program dan Kegiatan SKPD terkait Pelaksanaan Desa Masalah

| SKPD | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Dinas KB dan PP | Pembinaan, Pelatihan dan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan KIE • Pelayanan KB Momentum • KIE Keluarga dan BKB Posyandu • Pelatihan peningkatan usaha ekonomi Keluarga • Sosialisasi Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan anak • Pelayanan Baksos Mobil • Pembinaan dan pelatihan kerja bagi perempuan dalam meningkatkan usaha ekonomi keluarga |
| Dispendukcapil | Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) | Pelayanan KK, KTP dan Akta Kelahiran |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | Pengembangan event wisata |
| Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pembuatan roti • Pelatihan kewirausahaan • Pelatihan pembuatan makanan dan minuman • Pelatihan Handycraft • Pelatihan olahan hasil susu • Peningkatan Kopwan • Bimtek perkoperasian |
| Dinas Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> • Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun • Pendidikan Non Formal | <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sarana dan prasarana • Peningkatan Kualitas Guru • Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) • Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Peningkatan Kualitas | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pasar desa • Bimtek peningkatan kapasitas guna pelestarian asset • Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat • Rehab Balai Desa • Bantuan Usaha |
| Dinas Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesempatan Kerja • Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Produktifitas akan pelatihan kewirausahaan (processing makanan dan minuman) • Pelatihan Menjahit • Pelatihan Sepeda motor |
| Dinas Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kesejahteraan Petani • Peningkatan Penerapan Tehnologi • Peningkatan Produksi Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) • Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (SLPHT Komoditi Kopi) |

*Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)*

| SKPD | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan Irigasi • Peningkatan Ketahanan Pangan • Peningkatan kualitas bahan baku tembakau | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tepat Guna • Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian • Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Tek. Pertanian • Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian • Konservasi lahan untuk tanaman sayuran • Sekolah Lapang Iklim • Optimalisasi alat mesin pertanian Pembangunan/ Rehabilitasi irigasi tanah dangkal • Pengembangan tanaman sayuran organik |
| Dinas PU, SDA dan Tata Ruang | Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi | <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Bang/ Sal Jl. Sumber Penjalinan Ds. Jatisari • Sal irigasi Dsn. Dongol Ds. Siban • Geolistrik Ds. Lorokan kejayan • Sumur Bor Ds. Lorokan Kejayan • Perb. Dam dan Plengseng Jl. Towobiting Ds. Sukodermo • Re hab Bang/ Sal Jl. Gebang Ds. Banjarsari, Banjarkejen • Pembangunan Jl. Selang Dsn. Pojok Ds. Jeruk Purut • Rehab Bend/ Sal Jl. Tanggul Ds. Kenep • Rehab Bendung Plososari Dsn Krajan Ds Plososari Grati |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) | Keamanaan dan Ketertiban | <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan Miras • Penyuluhan politik kepada masyarakat • Pembinaan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat • Koordinasi forum-forum diskusi politik bagi ormas, LSM dan Parpol • Fasilitasi pemberdayaan ormas dan LSM • Pemantapan wawasan kebangsaan |
| SATPOL PP | Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Pembinaan penyuluhan transtibum terhadap masyarakat dan badan usaha |
| Bagian KESSOS | Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama | Rehab masjid dan musholah |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perpustakaan • Peningkatan kualitas pelayanan informasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan minat dan budaya baca • Layanan Puskeling ke SDN • Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di ling. Ins. Pemerintah • Pembinaan arsip • Pengembangan minat dan budaya baca |
| Dinas kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana Puskesmas • Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak • Perbaikan gizi masyarakat • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur • Pengembangan lingkungan sehat | <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kamar Polindes • Perabot Polindes • Renovasi Polindes • Ambulance Desa • Kelas ibu hamil • Program perbaikan gizi balita • Perbaikan gizi masyarakat • P4K • Pencegahan dan penanggulangan HIV/ Aids • Penyakit kulit • Imunisasi • Desa Siaga dan kader asuh • Penambahan Bidan desa • Kesehatan lingkungan dan TTU • Penanggulangan penyebaran ISPA karena debu kendaraan pengangkut pasir dan batu • Desa siaga • Penyuluhan gizi bagi balita |
| Dinas Perikanan | Peningkatan Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> • Sarana air bersih • Pengadaan benih ikan dan udang • Budidaya perikanan pedesaan • Pembuatan dan pemasangan rumpon dasar • Bimtek Diversifikasi olahan • Pembinaan POKDAKAN • Bimtek kenelayan • Sekolah lapang budidaya air payau • Sekolah lapang Busmetik • Bimtek aquascape dan ikan hias • Penanaman mangrove |

*Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)*

| SKPD | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) | <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) • Sosialisasi ketentuan bidang Cukai • Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) • Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) • Sosialisasi cukai Dialog public (sosialisasi Desa Masalah) • Dialog sosialisasi Narkoba |
| Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman | Rehab Sarana dan Prasaranan | <ul style="list-style-type: none"> • Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PJI • Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat Miskin • Penyediaan sarana dan prasarana air limbah • Pembangunan drainase |
| Dinas peternakan dan Ketahanan Pangan | Ketahanan pangan | <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan olahan bahan pangan local • Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan • Penyuluhan sumber pangan alternative • Sosialisasi keamanan pangan • Hibah (sapi potong, domba, biogas) • Bimtek ternak (besar, kecil, unggas) • Instalasi biogas • Pelatihan olahan susu • Bimtek olahan susu • 10) Pelayanan terpadu |

Sumber: Bappeda Kabupaten Pasuruan

Program Desa Masalah Kabupaten Pasuruan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi, dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang nantinya menjadikan ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (social). Dan faktanya hingga kini masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dan telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 Kabupaten Pasuruan memiliki penduduk sebanyak 1.569.507 jiwa. Berdasarkan analisis kemiskinan BPS pada tahun 2012 Kabupaten Pasuruan presentase penduduk miskin sebesar 11,54%, pada tahun 2013 menurun menjadi 11,22%. Meskipun menunjukkan trend menurun, persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kondisi sarana dan prasarana baik infrastruktur perhubungan dan transportasi, perumahan, Pendidikan, kesehatan dll masih ada kondisi yang jauh dari layak, begitu pula kondisi derajat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mengancam ketahanan pangan serta belum optimalnya sector pertanian untuk mendukung kemandirian pangan suatu desa. Selain itu salah satu penyebab kurang berhasilnya program penanganan kemiskinan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down, sehingga formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi sangat spesifik tergantung daerah masing-masing. Dengan melihat kondisi tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Desa Masalah Kabupaten Pasuruan, maka dibentuk Program Desa Masalah (Maju Aman Sehat Lahir Batin, Adil dan Bermartabat), dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, yang dilaksanakan sebagai upaya mengurangi beban masyarakat dan

Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pasuruan. Untuk wilayah Desa Maslahat sudah di cantumkan diatas.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang strategis dalam upaya untuk mensukseskan program peningkatan kesempatan, kemampuan, dalam bidang pelayanan perekonomian masyarakat yang ber- *Maslahat*. Dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Pusat Strategi dan Pelayanan Ekonomi Maslahat yang selanjutnya akan disebut Satria Emas untuk mendorong:

1. Tumbuhnya wirausaha baru,
2. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
3. Penciptaan lapangan kerja baru,
4. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
6. Pertumbuhan ekonomi daerah dan Indeks Pembangunan Manusia

Wilayah Pelayanan Satria Emas selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan yang mencakup beberapa wilayah kecamatan dengan pusat administrasi di salah satu kecamatan. Anggaran Satria Emas bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan:

- Kabupaten Pasuruan telah memiliki regulasi yang secara spesifik mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut;
- Program/kegiatan yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi:
- Ruang fiskal pendapatan daerah masih di bawah 50 persen, dengan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kabupaten Pasuruan sangat tergantung dengan pihak eksternal dalam membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.

Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pasuruan telah terbentuk;
- Demi efektifitas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan maka di bentuklah Program Desa Maslahat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016;
- Telah dibentuk tim Pelaksanan Percepatan Pembangunan Desa Maslahat (P3DM) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 050/ 118/ HK/ 424.014/ 2017;
- Telah dibentuk Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (Satria Emas) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016;

*Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)*

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan.

1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,24 persen per-tahun;
2. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 10,72% menjadi 10,57% di tahun 2016 ($\pm 168,060$ ribu jiwa);
3. Pada tahun 2016, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
4. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, tetapi masih di atas target RPJMD;
5. Indikator-indikator yang perlu perhatian (menjadi focus) untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini.

Rekomendasi

1. Mempertahankan upaya-upaya (kebijakan dan program) penanggulangan kemiskinan yang telah menunjukkan hasil capaian yang baik pada tahun ini
2. Lebih memperkuat pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, dan aturan pelaksanaannya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013, Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas2013, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2011, Definisi Operasional Indikator MDG's, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

*Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuraun
Tahun 2017 (Diah Tri Hermawati)*

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Keadaan Angkatan Kerja di
Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Hasil Survey Sosial Ekonomi
Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Keadaan Angkatan Kerja di
Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Hasil Survey Sosial Ekonomi
Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Keadaan Angkatan Kerja di
Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2015, Kabupaten Pasuruan Dalam
Angka Tahun 2015, Pasuruan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2015, Statistik Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2015, Pasuruan.

